

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi memegang peran yang sangat penting dalam manajemen suatu entitas, termasuk pada entitas sektor publik. Dalam sektor publik, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (Costari & Belinda, 2021). Salah satu aspek akuntansi yang sangat penting adalah manajemen pengelolaan aset tetap, yang merupakan bagian dari kekayaan negara dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Adanya aset tetap yang bernilai besar dan mempunyai masa manfaat panjang menjadikan pengelolaannya sebagai suatu aspek utama. Oleh karena itu, sektor publik perlu mengelola aset tetap secara sistematis, teratur, dan berdasarkan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pengelolaan aset tetap yang efektif dan akurat sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan aset tetap harus selaras dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang berlaku. Aturan tersebut secara resmi diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang aset tetap yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang akuntansi pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 adalah pedoman standar untuk akuntansi aset tetap bagi entitas pemerintah. Standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pengungkapan aset tetap dalam akuntansi pemerintah. Standar ini mengatur bahwa aset tetap milik pemerintah harus dicatat sebesar biaya perolehannya. Pengelolaan aset dilakukan selama masa manfaatnya, dan ketika aset tidak lagi memberikan manfaat, aset tersebut harus dihentikan pengakuannya melalui proses penghapusan (Rosidah et al., 2024). Aset tetap yang meliputi tanah, gedung, peralatan, kendaraan, dan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan pencapaian tujuan. Kepatuhan terhadap standar pengelolaan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang terpercaya, transparan, dan akuntabel untuk semua pihak yang berkepentingan.

Aset pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis , meliputi aset berwujud dan aset tidak berwujud (Idrus et al., 2022). Aset yang berwujud meliputi berbagai aset yang digunakan dalam jangka panjang atau permanen dalam menjalankan kegiatan perusahaan, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan kantor. Menurut PSAP No 07, dimana penghentian pengakuan aset tetap terjadi pada dua kondisi yaitu kondisi pertama adalah aset tersebut dilepaskan, misalnya dengan dijual atau dialihkan ke pihak lain dan kondisi kedua terpenuhi ketika aset sudah tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan

jika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan baik dari penggunaan maupun pelepasan (Aditya et al., 2024). Kondisi ini umumnya terjadi pada aset yang sudah usang, rusak, atau telah mencapai akhir masa manfaatnya. Oleh karena itu, penghapusan pengakuan ini sangat penting untuk keakuratan laporan keuangan dan mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya.

Menurut (Riamah et al., 2025) pengelolaan aset tetap yang efektif sesuai dengan standar akuntansi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas suatu entitas. Dengan pengelolaan aset tetap yang akurat, entitas dapat menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap kinerja entitas tersebut. Selain itu, pengelolaan aset tetap yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, karena aset tetap yang tercatat dengan baik dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari risiko kerusakan yang tidak terdeteksi.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tegal merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tugas pokok kantor ini meliputi pemantauan keselamatan pelayaran, penegakan hukum maritim, dan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, sebagai salah satu instansi yang berperan dalam mengelola pelabuhan, memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Tegal dan sekitarnya. Aset tetap yang dimiliki oleh lembaga ini, seperti dermaga, gudang, alat bongkar muat, dan

infrastruktur pendukung lainnya, merupakan sumber daya yang sangat penting untuk mendukung operasional pelabuhan. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius.

Permasalahan pertama, terdapat mesin fotocopy yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, namun masih dicatat sebagai aset tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa instansi belum melakukan penghapusan atau penurunan nilai aset tetap yang sudah tidak berfungsi, sehingga laporan keuangan lembaga tersebut mencerminkan aset yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomis. Permasalahan kedua, pengakuan aset tetap pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tegal ditetapkan berdasarkan batas nilai minimum. Artinya, hanya aset tetap yang nilainya melebihi ambang batas tertentu yang akan diakui dan dicatat sebagai aset tetap, sementara aset dengan nilai di bawah batas tersebut dianggap sebagai pengeluaran operasional. Praktik ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan, karena aset-aset kecil yang memiliki manfaat jangka panjang tidak tercatat dengan baik, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas entitas.

Permasalahan tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat yang merugikan. Pertama, ketidakakuratan dalam pengelolaan aset tetap dapat menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya, sehingga mengurangi kepercayaan stakeholders terhadap instansi. Kedua, dengan pengelolaan aset tetap yang tidak efektif,

instansi dapat mengalami ketidakefisienan operasional karena aset tetap yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal tidak digunakan dengan baik. Ketiga, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dapat menimbulkan risiko, karena instansi dapat dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel dalam pengelolaan sumber dayanya.

Dalam konteks urgensi penelitian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Tegal dan sekitarnya. Sebagai salah satu pelabuhan kelas IV, lembaga ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan efisiensi arus lalu lintas kapal, menghasilkan pendapatan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, instansi ini perlu memiliki sistem pengelolaan aset tetap yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No 07, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang perlakuan akuntansi aset tetap di sektor publik, serta dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap dan laporan keuangan instansi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi instansi atau perusahaan sejenis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Dengan demikian, dari pemaparan latar belakang diatas , maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS**

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV TEGAL”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dengan PSAP No 07?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dengan PSAP No 07.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu akuntansi, khususnya dalam memperluas wawasan tentang penerapan PSAP No 07 terkait aset tetap di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal Tegal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis terkait perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No 07 pada suatu entitas.

b. Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan saran yang berguna bagi instansi, sebagai pertimbangan dalam memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada dalam perusahaan/ instansi yang berhubungan dengan aset berdasarkan PSAP No 07.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

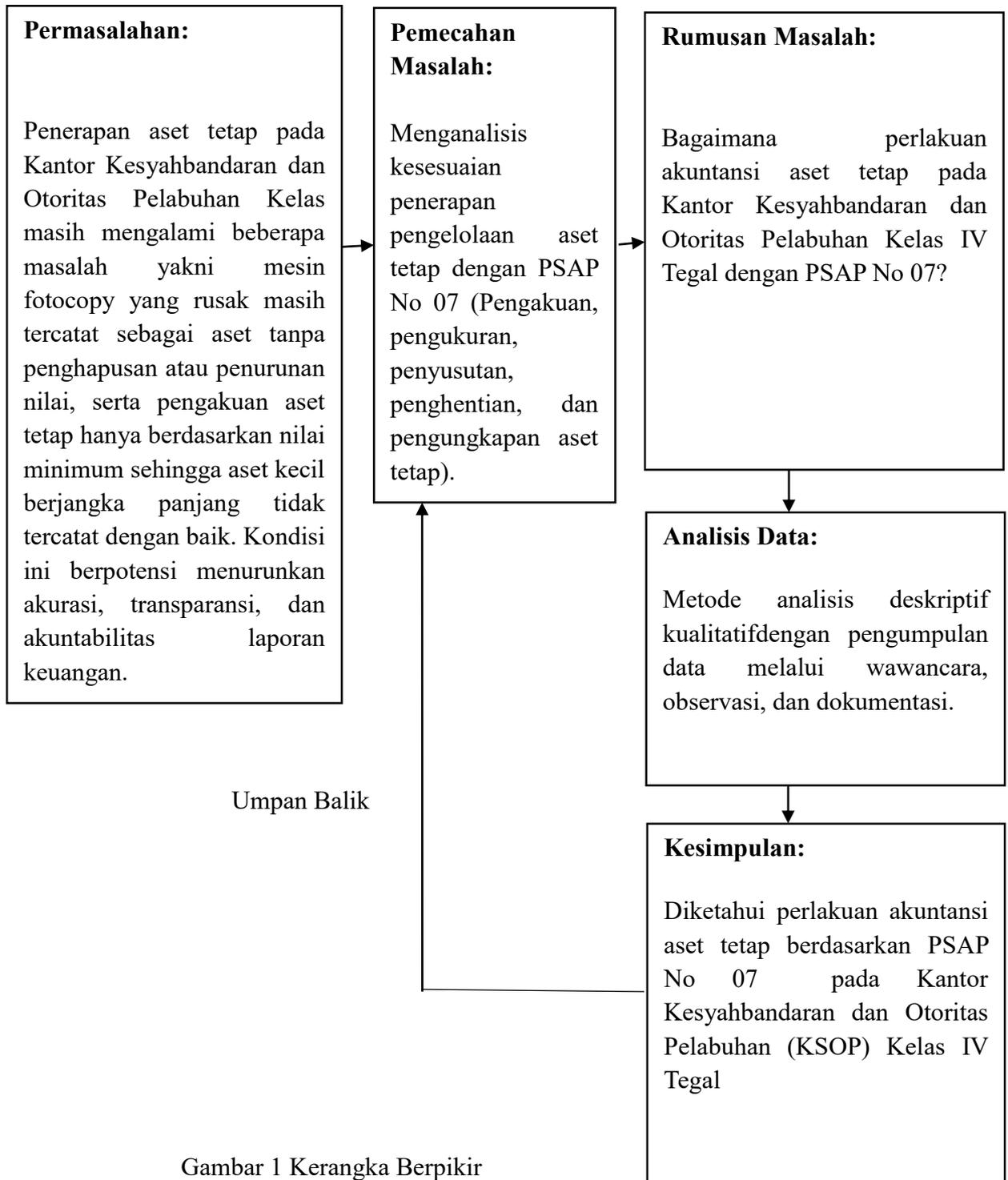
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.

1.5 Batasan Masalah

Penetapan pembatasan masalah dilakukan untuk memastikan penelitian tetap fokus pada inti permasalahan. Agar penelitian lebih terarah menghasilkan analisis yang tepat dan akurat, serta tidak menyimpang dari tujuan dan perumusan masalah penelitian. Dalam tugas akhir ini peneliti membatasi masalah hanya pada perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal tahun 2024. Sedangkan pada PSAP No 07, peneliti dilakukan mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian hingga pengungkapan aset tetap berwujud.

1.6 Kerangka Berpikir

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal mengalami masalah dalam pengelolaan aset tetap, yaitu mesin fotocopy yang rusak masih tercatat sebagai aset tanpa penghapusan atau penurunan nilai, serta pengakuan aset tetap hanya berdasarkan nilai minimum sehingga aset kecil berjangka panjang tidak tercatat dengan baik. Kondisi ini berpotensi menurunkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menganalisis kesesuaian penerapan pengelolaan aset dengan PSAP No 07. Menganalisis beberapa aspek penting yaitu pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, serta pengungkapan aset tetap. Rumusan masalah tersebut Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dengan PSAP No 07 dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif kepada pembaca mengenai struktur dan isi tugas akhir, memfasilitasi pemahaman yang lebih mudah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal tugas akhir ini terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian awal ini ditujukan untuk memfasilitasi pembaca dalam mengakses bagian-bagian signifikan secara efisien.

2. Bagian isi mencakup lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi berbagai teori-teori pendukung yang melandasi penulisan penelitian, Teori-teori ini sebagai dasar pemikiran atau referensi dalam menjalankan penelitian teori-teori yang mendasari penulisan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB II memuat informasi lengkap mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menyajikan kesimpulan yang berisi inti hasil penelitian, diikuti dengan saran dari peneliti yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi instansi atau perusahaan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir tugas akhir berisi daftar pustaka yang mencakup semua referensi dan literatur relevan, serta lampiran yang menyajikan informasi tambahan untuk mendukung kelengkapan tugas akhir.